



JOURNAL OF Qualitative Health Research
& Case Studies Reports

ISSN 28079094 (Print)

ISSN 28078489 (Online)



INFORMASI ARTIKEL

Received: May, 11, 2026

Revised: June, 08, 2026

Available: June, 14, 2026

at : <https://e-jurnal.ipohrr.com/index.php/qlt>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Universtias Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

Abstract

Background: PT. PLN Payo Selincih Generating Unit, Jambi, has implemented an Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and received a zero accident award from 2020 to 2025.

Purpose: To determine the implementation of SMK3 in the company, related to the components of SMK3 implementation and its challenges.

Method: Qualitative research using a descriptive observational approach. Data were obtained from four informants through in-depth interviews, observations, and document reviews. The research was conducted at the PLN Payo Selincih Generating Unit, Jambi.

Results: The establishment of the OSH policy is realized through a written quality commitment from top management to achieve zero accidents. OSH planning is systematically developed through P2K3 meetings, while OSH implementation is supported by the availability of adequate human resources, facilities, infrastructure, and funding. Monitoring and evaluation are carried out through routine supervision and Internal and External Audits of the SMK3, followed by continuous performance reviews and improvements. The main challenge in implementing this policy is internal factors, such as low worker awareness and discipline in the use of PPE. External factors do not have a significant impact because the regulations are integrated into the company's system.

Conclusion: The implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at PLN's Generating Units has been running well in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012 through systematic policy formulation, planning, implementation, and evaluation. However, internal challenges remain, including low worker discipline in the use of PPE.

Keywords: Occupational Safety; Occupational Health; PLN; SMK3.

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah sistem manajemen dalam rangka pengendalian risiko yang berhubungan dengan aktivitas kerja agar dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif melalui pendekatan terencana secara menyeluruh di lingkungan perusahaan (Adiratna, Astono, Fertiaz, Subhan, Sugistria, & Prayitno, 2022). Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya,

menilai dan mengendalikan risiko, serta memastikan adanya pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses keselamatan kerja. SMK3 tidak hanya memenuhi aspek hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tetapi juga menjadi indikator profesionalisme dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Agustiani & Arsi, 2025).

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

Salah satu sektor yang sangat krusial dalam penerapan SMK3 adalah sektor energi, khususnya pada pembangkit listrik. Industri kelistrikan di Indonesia yakni PLN memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan permintaan listrik yang dipicu oleh perkembangan industri, urbanisasi, dan digitalisasi, telah membawa tantangan besar bagi sektor kelistrikan. Peningkatan konsumsi energi ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang handal dan aman terutama dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Astari & Suidarma, 2022).

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), sektor kelistrikan memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi, mengingat sifat pekerjaan yang berhubungan dengan perangkat dan instalasi yang dapat menimbulkan bahaya fatal. Oleh karena itu, pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dilakukan dengan sangat serius. Sehingga dengan adanya kasus kecelakaan kerja, standar OHSAS 18001:2007 memang menekankan pentingnya setiap industri untuk menelaah peraturan dan menerapkan sistem pengendalian risiko. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir musibah atau pencemaran lingkungan yang dapat merugikan. Sistem atau kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang baik merupakan alat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Salah satu upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Diaz, Rambey, & Tarigan, 2024).

Data global juga menunjukkan urgensi penerapan SMK3 secara serius. Menurut Data terbaru dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018, lebih dari 2.78 juta pekerja di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Sekitar 2.4 juta (86.3%) kematian di tempat kerja dikarenakan adanya penyakit akibat kerja, sedangkan kecelakaan kerja terjadi lebih dari sekitar 380.000 (Cahyani & Ars, 2025). Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga terjadi di Indonesia yang diindikasikan cenderung meningkat, namun data kasus secara lengkap yang merepresentasikan angka nasional belum tersedia sepenuhnya.

Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370,747 kasus. Sekitar 93.83% merupakan kasus peserta penerima upah, 5.37% kasus peserta bukan penerima upah, dan 0.80% kasus khususnya peserta jasa konstruksi (Creswell & Creswell, 2017). Angka ini merefleksikan bahwa penerapan K3 di berbagai sektor kerja, khususnya di sektor industri dengan risiko tinggi, belum sepenuhnya optimal dan berdasarkan data jumlah pekerja yang mendapatkan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dari tahun 2019 s.d. 2021 tercatat berturut-turut sebanyak 210,789 orang (4,007 orang fatal), 221,740 orang (3,410 orang fatal) dan 234,370 orang (6,552 orang fatal). Biaya kompensasi yang dikeluarkan berturut-turut dari 2019 s.d. 2021 yaitu: Rp 1.58 T, 1.56 T, dan Rp. 1.79 T (Daeli, Rahman, Fatimah, & Rahmat, 2025).

Kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat individual bagi tenaga kerja, tetapi juga secara signifikan merugikan perusahaan dari sisi finansial, reputasi, dan produktivitas. Hal ini menunjukkan risiko yang mungkin timbul mencakup potensi paparan terhadap arus listrik bertegangan tinggi, risiko kebakaran dan ledakan, serta bahaya jatuh dari ketinggian pada saat melakukan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan (Daniel, 2022). Sehingga urgensi dari penerapan SMK3 juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012 yang berisi tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur bahwa setiap perusahaan dengan syarat tertentu seperti mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi harus menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, produktif, serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan PP No. 50 tahun 2012, salah satu sektor kelistrikan yakni PLN Payo Selincah Jambi wajib untuk menerapkan SMK3 karena memiliki tingkat risiko yang tinggi. PLN Payo Selincah Jambi bertanggung jawab untuk merawat aset, termasuk

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

pemeliharaan berbasis waktu, kondisi, dan darurat. PLN Payo Selincih Jambi ingin menerapkan program SMK3 untuk karyawan PLN dan komunitas di sekitar tempat kerja mereka karena ada kemungkinan bahaya di lingkungan kerja. Kebijakan SMK3 dirancang untuk mencapai kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. PLN Payo Selincih Jambi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berlokasi di Jalan Berdikari No. 26 RT 24, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. PLTG ini memiliki 2 unit mesin dengan total daya terpasang sebesar 60 MW, yaitu 2x50 MW per unit.

PLTG Payo Selincih merupakan pembangkit kelima di Kota Jambi dan masih beroperasi hingga saat ini. Dasar kegiatan adalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas tata ruang dan perumahan Kota Jambi Atas nama pemilik Ir. Made Pramudya, M.M atas nama PT. PLN (Persero) dengan nomor IMB 648/538/5-JT/IV/2011 Tanggal 14 april 2011. PLN Payo Selincih Jambi ini memiliki peranan strategis dalam menyediakan kebutuhan energi listrik bagi wilayah sekitarnya dan beroperasi dengan kapasitas 2x50 MW. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 144 orang yang menunjukkan bahwa perusahaan harus menerapkan SMK3 sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2012 bahwa setiap perusahaan dengan syarat tertentu seperti mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.

Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi merupakan salah satu pembangkit yang memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan SMK3 dengan efektif. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mendukung penerapan SMK3, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran tentang pentingnya K3, hingga tantangan teknis dalam penerapan kebijakan di lapangan.

Pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus dilakukan dengan sangat serius. Dengan adanya kasus kecelakaan kerja, standar OHSAS 18001:2007 memang menekankan pentingnya setiap industri untuk menelaah peraturan dan menerapkan sistem pengendalian risiko. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir

musibah atau pencemaran lingkungan yang dapat merugikan. Sistem atau kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang baik merupakan alat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Salah satu upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Darmadi, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal di PLN Payo Selincih Jambi menunjukkan bahwa kebijakan SMK3 telah ditetapkan oleh manajemen, tetapi pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pekerja belum sepenuhnya memahami prosedur keselamatan, penggunaan APD kadang belum konsisten, pengawasan belum sepenuhnya menyeluruh, dan budaya keselamatan kerja belum merata di seluruh unit. Fenomena ini menunjukkan gap antara kebijakan formal dan praktik sehari-hari, yang menjadi dasar penting untuk penelitian ini. Gap tersebut tidak menilai SMK3 buruk, tetapi menyoroti area yang membutuhkan perhatian dan peningkatan implementasi.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penerapan SMK3 menjadi sangat penting, terutama di sektor energi dan pembangkit listrik yang memiliki risiko tinggi, seperti paparan arus listrik, risiko kebakaran, ledakan, dan jatuh dari ketinggian. PLN Payo Selincih Jambi bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar, sehingga analisis implementasi SMK3 dan tantangan penerapannya sangat relevan. Tantangan penerapan SMK3 di unit ini meliputi: Faktor internal: keterbatasan SDM kompeten, anggaran, fasilitas, pengawasan, dan budaya keselamatan kerja. Faktor eksternal: kepatuhan karyawan seperti tidak menggunakan APD, perubahan regulasi, audit eksternal, serta kondisi lingkungan kerja.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan SMK3 dapat berjalan efektif jika didukung kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan rutin oleh manajemen. Namun, studi terdahulu cenderung menekankan evaluasi sistem secara umum, tanpa menyoroti tantangan implementasi kebijakan terbaru di lapangan. Sehingga, penelitian ini penting untuk meneliti gap antara kebijakan dan praktik di PLN Payo Selincih Jambi. Mengingat bahwa sangat pentingnya

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

penerapan SMK3 ini, maka dari itu hendaknya setiap komponen pekerja di PLN Payo Selincih Jambi dapat mengikuti secara aktif dalam pelaksanaan penerapan SMK3 sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang baik yang akan memenuhi target kerja.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan SMK3 yang dimulai dari tahap penetapan kebijakan, sampai pelaksanaan dan evaluasi SMK3 serta manfaat dan kendala pelaksanaannya pada PLN Payo Selincih Jambi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan standar keselamatan yang semakin ketat, tantangan penerapan kebijakan yang sesuai akan memastikan bahwa Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi dapat beroperasi dengan aman dan tetap menjaga reputasinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Beberapa studi telah meneliti tentang penerapan SMK3 di mana terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan SMK3 di PT. Permata Dunia Sukses Utama dengan variabel penelitian komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, Pelaksanaan rencana K3, pengukuran dan evaluasi kinerja K3, serta tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen terhadap penerapan SMK3 telah sesuai dengan regulasi PP Nomor 50 Tahun 2012 dengan kategori penilaian diri dengan jumlah kriteria yang tercapai 162 Kriteria dari total 166 kriteria penerapan tingkat lanjutan, dengan kata lain pencapaian penerapan sebesar 97.5 % termasuk dalam kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan memuaskan. Pihak PT. Permata Dunia Sukses Utama ini dapat mendapatkan dan meningkatkan penerapan SMK3 (Ariya, 2024).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Manderos berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem manajemen keselamatan SMK3 di PLN UP3 Tobelo sudah memenuhi unsur K3.12 Laporan audit SMK3 tahun 2023 mengevaluasi penerapan sistem terhadap 166 kriteria dan tergolong memuaskan. Pembuatan kebijakan ini merupakan wujud komitmen manajer dan pegawai untuk menerapkan SMK3 yang diperkuat dengan tersedianya dokumen prosedur kerja dan manual, perencanaan K3, dan program K3 untuk meniadakan kecelakaan kerja,

serta pemantauan, evaluasi, dan peninjauan untuk meningkatkan SMK3. Manager dan Pejabat K3 harus terus mengawal dan memberikan pelatihan K3 kepada pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja SMK3.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai SMK3 dalam sektor kelistrikan hanya berfokus pada evaluasi penerapan sistem secara umum, tanpa melihat secara spesifik tantangan penerapan kebijakan terbaru yang berlaku. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak implementasi SMK3 terhadap tingkat kecelakaan kerja, namun belum banyak yang membahas kesenjangan antara tantangan penerapan kebijakan yang digunakan di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

Melalui implementasi SMK3, tidak jarang kebijakan sudah ada secara formal, namun penerapan di lapangan belum sepenuhnya sesuai. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan, karena keberhasilan SMK3 tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan, tetapi juga pada efektivitas implementasi, kepatuhan pekerja, pengawasan, dan budaya keselamatan kerja. Fenomena ini menjadi alasan kuat untuk memasukkan variabel tantangan penerapan SMK3 dalam penelitian ini. Melalui tantangan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan SMK3 di PLN Payo Selincih Jambi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan realistis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk secara intuitif memahami secara mendalam proses implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) beserta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lingkungan kerja PLN Payo Selincih Jambi Unit Peimbangkit. Penelitian kualitatif digunakan untuk secara intuitif mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari pengalaman sosial individu atau kelompok. Konteks dalam penelitian ini terdiri dari pengalaman pekerja K3, manajer, dan pekerja menjadi sumber utama data intuitif yang dianalisis

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

secara tematik (Priono, 2025).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari manajer unit sebagai informan kunci, ketua tim K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagai informan utama, kepala divisi operasi sebagai informan utama, dan kepala divisi pemeliharaan sebagai informan utama.

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal. Studi kasus ini dipilih karena berfokus pada satu unit organisasi (Unit PLN Payo Seilincih) dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang implementasi K3MS di dalamnya. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memeriksa proses, interaksi, kebijakan, dan dinamika yang terjadi di lapangan secara mendalam dan kontekstual. Peneliti tidak hanya melihat "apa yang terjadi", tetapi juga mencoba memahami "mengapa" dan "bagaimana" kebijakan K3 diimplementasikan, serta tantangan apa yang muncul dalam implementasinya.

Variabel penelitian terdiri dari Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3, Faktor Internal, dan faktor eksternal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dengan informan. Dalam hal ini, pengumpulan data penelitian menyediakan alat seperti panduan wawancara yang digunakan sebagai pedoman untuk secara intuitif menentukan topik wawancara yang akan diajukan kepada informan berdasarkan kebutuhan peneliti, selain itu, lembar observasi digunakan untuk secara intuitif memperoleh informasi tentang variabel yang relevan dengan tujuan penelitian dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin. Kemudian hasil data wawancara dari responden dicatat menggunakan alat tulis dan

telepon seluler, bersama dengan beberapa dokumen, dan laptop digunakan untuk mengolah data, melakukan analisis data, dan membuat laporan akhir.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga teknik utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti terkait dengan objek yang diteliti melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data intuitif untuk mendapatkan informasi mendalam atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab antara pewawancara, dalam hal ini peneliti, dan informan. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan langsung oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan tinjauan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Data sekunder adalah informasi yang melengkapi data primer dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder dapat mencakup sumber dokumenter, literatur, dan bibliografi. Pengumpulan data terkait berupa informasi seperti profil perusahaan, data ketenagakerjaan, hasil audit SMK3, laporan P2K3, dan sebagainya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tahapan yang menjadi satu kesatuan dengan cara mengurutkan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari poin-poin data, dan selanjutnya dapat disebarluaskan sebagai informasi yang lebih baik. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara manual menggunakan matriks wawancara.

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

HASIL**Tabel 1. Karakteristik Informan**

Informan	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Keterangan Informan
HI	Manajer	L	45 Tahun	S1	5 Tahun	Informan Kuinci
IS	Team Leader K3	L	46 Tahun	S1	8 Tahun	Informan Utama
FS	Keipala Opeirasi	L	37 Tahun	S1	3 Tahun	Informan Utama
ME	Keipala Peimeliharaan	L	39 Tahun	S1	7 Tahun	Informan Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kebijakan SMK3 di perusahaan berasal dari pusat dan diturunkan ke unit kerja untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut bersifat wajib dan telah ditetapkan secara formal melalui aturan tertulis yang ditandatangani oleh manajemen. Dalam penerapannya, kebijakan K3 disosialisasikan kepada seluruh pekerja melalui briefing sebelum kerja, pemasangan informasi di area kerja, serta pengawasan langsung dari atasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, diketahui bahwa kebijakan K3 yang diterapkan di perusahaan termasuk dalam kategori kebijakan formal yang bersifat *top-down*, di mana kebijakan tersebut ditetapkan oleh pihak pusat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Kebijakan ini mencerminkan adanya komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta memastikan seluruh pekerja mematuhi aturan yang telah ditetapkan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencapai *Zero Accident*.

Selain itu, komitmen K3 tersebut didokumentasikan dalam bentuk plakat komitmen yang ditempatkan di area kerja sebagai bentuk pengingat bagi seluruh pekerja agar selalu mematuhi kebijakan K3. Dokumentasi ini menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komitmen tersebut secara berkala akan dievaluasi oleh unit induk sebagai bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan K3 benar-benar diterapkan secara konsisten.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan para informan, diketahui bahwa perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkit 'PLN Payo Selincah Jambi telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur oleh pihak manajemen. Perencanaan tersebut umumnya disusun pada level manajemen atas kemudian diturunkan ke unit pelaksana untuk diimplementasikan di lapangan. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan K3 memiliki alur yang jelas dari tingkat perencanaan strategis hingga operasional.

Perencanaan K3 di lingkungan unit dilakukan melalui mekanisme rapat yang melibatkan pihak manajemen dan stakeholder terkait. Dalam forum tersebut dibahas berbagai program kerja K3 yang akan dijalankan, seperti pelatihan keselamatan kerja, pengadaan alat pelindung diri (APD), serta berbagai kegiatan lain yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Struktur organisasi, perencanaan K3 didukung oleh adanya penanggung jawab khusus di bidang keselamatan kerja. Namun demikian, pada tingkat unit operasional, fungsi K3 masih terdistribusi dengan bidang lingkungan dan keamanan dalam satu struktur yang dikenal sebagai Tim Leader K4L (Keselamatan Kerja, Kelamanan, dan Lingkungan). Penggabungan fungsi ini menunjukkan adanya keterpaduan tugas, tetapi

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

sekaligus menjadi tantangan karena ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar seluruh aspek K3 tetap dapat terkelola dengan baik.

Selain bersifat *top-down*, perencanaan K3 juga bersumber dari kebijakan Unit Bisnis Pembangkit (UBP) yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing unit. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui forum rapat rutin, termasuk rapat bulanan dan rapat P2K3 yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam forum tersebut dibahas kendala yang dihadapi di lapangan serta alternatif solusi yang dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Perencanaan K3 juga menunjukkan adanya keterlibatan pekerja di lapangan melalui penyampaian masukan terkait kebutuhan operasional keselamatan kerja. Hal ini menandakan bahwa perencanaan tidak sepenuhnya bersifat satu arah, melainkan juga membuka ruang partisipasi dari tingkat pelaksana. Partisipasi tersebut menjadi penting karena dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan program K3 dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil triangulasi, dapat diketahui bahwa perencanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah sejalan dengan prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Perencanaan dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai pihak terkait, serta mencakup program kerja yang jelas dalam rangka mendukung pencapaian target keselamatan kerja, termasuk *Zero Accident*. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani K3 serta penggabungan fungsi K3 dengan bidang lain yang berpotensi meningkatkan beban kerja.

Selain itu, ketergantungan terhadap kebijakan dari tingkat atas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fleksibilitas perencanaan di tingkat unit. Meskipun demikian, adanya ruang untuk memberikan masukan dari pekerja menjadi aspek positif yang mendukung efektivitas perencanaan K3 agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, perencanaan K3 tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga bersifat adaptif

terhadap kebutuhan operasional.

Secara keseluruhan, perencanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah memenuhi unsur-unsur dalam penerapan SMK3, yaitu adanya penyusunan program kerja, pelibatan stakeholder, serta upaya identifikasi kebutuhan dan risiko di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki komitmen dalam membangun sistem keselamatan kerja yang terstruktur, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek koordinasi dan optimalisasi sumber daya agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan pelaksanaan K3, hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala terutama terkait kepatuhan pekerja di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan wajib diterapkan oleh seluruh pekerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pekerja, khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah tersedia, faktor perilaku individu masih menjadi tantangan utama dalam implementasi K3 di lapangan.

Selain itu, pelaksanaan K3 juga sangat dipengaruhi oleh pengawasan. Pekerja cenderung lebih patuh ketika terdapat pengawas atau petugas K3 di lokasi kerja, namun kepatuhan tersebut menurun ketika pengawasan tidak dilakukan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3 masih perlu ditingkatkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan K3 adalah kenyamanan dalam penggunaan APD. Sebagian pekerja menganggap penggunaan APD sebagai sesuatu yang mengganggu aktivitas kerja, sehingga enggan untuk menggunakannya secara konsisten. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan K3 yang optimal di lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, diketahui bahwa pelaksanaan

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi termasuk dalam kategori implementasi yang belum optimal. Meskipun telah memiliki aturan dan SOP yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan dari segi perilaku pekerja dan konsistensi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran, pembinaan, serta pengawasan yang lebih intensif agar penerapan K3 dapat berjalan secara maksimal dan mendukung tercapainya *Zero Accident*.

Pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi tidak hanya berfokus pada penerapan aturan dan penggunaan APD, tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pengarahan sebelum kerja (*briefing*) serta pengingat secara langsung di lapangan oleh petugas K3 maupun atasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja agar lebih disiplin dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja.

Pelaksanaan K3 juga didukung dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam setiap aktivitas kerja. SOP tersebut

mengetahui langkah-langkah kerja yang aman serta penggunaan perlengkapan keselamatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja. Namun demikian, keberadaan SOP saja belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pekerja apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan kesadaran individu.

Perilaku pekerja menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan K3. Masih adanya pekerja yang tidak konsisten dalam menggunakan APD menunjukkan bahwa budaya K3 belum sepenuhnya tertanam. Kebiasaan lama serta anggapan bahwa penggunaan APD mengganggu kenyamanan kerja menjadi alasan utama ketidakpatuhan tersebut.

Melalui pelaksanaan K3, perusahaan telah memiliki bentuk dokumentasi sebagai bukti capaian pelaksanaan rencana K3 yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa bentuk capaian pelaksanaan rencana K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi ditunjukkan melalui adanya piagam penghargaan atas kecelakaan nihil (*Zero Accident*) yang diperoleh perusahaan.

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Rencana K3

No	Peindokumeintasian K3	Keterangan
1.		Hasil Audit unit yang telah menerapkan SMK3 dengan kategori tingkat lanjutan.
2.		Sertifikat standar internasional Sistem Manajemen K3 dari Sucofindo (Masa berlaku 2024-2027).

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universtias Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

3.



SK pengesahan P2K3 PT PLN Indonesia Power UBP Jambi oleh Disnakeir Provinsi Jambi.

4.



Kebijakan perusahaan yang menjadi dasar penerapan SMK3 dan sistem manajemen terintegrasi di PLN Indonesia Power

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan didapatkan hasil bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan K3 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pemantauan K3 dilakukan oleh tim K3 melalui kegiatan monitoring secara langsung di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja telah sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui pengecekan rutin terhadap pelaksanaan program K3.

Evaluasi K3 dilakukan secara berkala melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah audit internal yang dilaksanakan oleh pihak Unit Bisnis Pembangkit (UBP). Audit ini bertujuan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menghadapi audit eksternal serta memastikan bahwa seluruh dokumen dan pelaksanaan

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

K3 telah sesuai dengan standar yang berlaku. Audit biasanya dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari sistem evaluasi yang berkelanjutan.

Selain audit internal, evaluasi juga dilakukan melalui pelaporan hasil kegiatan K3 kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan perbaikan ke depan. Dengan adanya proses evaluasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kekurangan yang ada serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam penerapan K3.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, diketahui bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah berjalan secara rutin dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dalam SMK3 dengan baik. Namun demikian, hasil evaluasi tersebut perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat segera diperbaiki dan tidak terulang kembali.

Selanjutnya variabel Peningkatan dan Perbaikan menunjukkan bahwa upaya peningkatan dan perbaikan dalam penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa peningkatan dan perbaikan K3 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan audit di lapangan. Setiap temuan yang muncul kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan agar pelaksanaan K3 ke depan dapat berjalan lebih optimal.

Selain itu, perusahaan juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan pekerja dalam penerapan K3, salah satunya melalui pemberian reward. Pemberian reward ini bertujuan untuk mendorong pekerja agar lebih aktif dan peduli terhadap keselamatan kerja, serta membentuk kebiasaan positif dalam melaporkan maupun menjalankan prosedur K3. Dengan adanya motivasi tersebut, diharapkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3 dapat meningkat.

Upaya perbaikan yang dilakukan bersifat berkelanjutan (*continuous improvement*), di mana perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi,

tindak lanjut, serta pengembangan sistem K3. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SMK3 tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, diketahui bahwa peningkatan dan perbaikan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi, tindak lanjut temuan, serta pemberian motivasi kepada pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam SMK3 guna meningkatkan efektivitas penerapan K3 serta mendukung tercapainya tujuan *Zero Accident*.

Selanjutnya pada variabel tantangan penerapan kebijakan khususnya faktor internal menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi berasal dari individu pekerja itu sendiri. Faktor ini menjadi salah satu penghambat utama dalam keberhasilan implementasi K3 di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa faktor internal yang paling dominan dalam mempengaruhi penerapan K3 adalah tingkat kesadaran dan perilaku pekerja. Kesadaran individu terhadap pentingnya keselamatan kerja menjadi kunci utama dalam menentukan apakah kebijakan dan prosedur K3 dapat dijalankan dengan baik di lapangan.

Selain itu, kedisiplinan pekerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi K3. Masih adanya pekerja yang kurang disiplin dalam menerapkan aturan keselamatan menunjukkan bahwa budaya K3 belum sepenuhnya tertanam secara kuat. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD maupun prosedur kerja yang aman.

Lebih lanjut, faktor manusia yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan K3. Setiap individu memiliki karakter, kebiasaan, dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga tidak semua pekerja dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan aturan K3 yang telah ditetapkan. Proses perubahan perilaku membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, diketahui bahwa faktor internal

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

dalam penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi didominasi oleh aspek perilaku dan kedisiplinan individu pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran, pembinaan, serta pembentukan budaya K3 yang kuat agar setiap pekerja memiliki komitmen dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten.

Selain itu pada faktor eksternal menunjukkan bahwa hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi K3 lebih banyak berasal dari faktor internal dibandingkan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa faktor eksternal dalam penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi memiliki pengaruh yang relatif kecil. Hal ini disebabkan karena sistem dan kebijakan K3 yang diterapkan di perusahaan sudah cukup jelas serta berada dalam kendali internal organisasi.

Selain itu, kegiatan operasional yang dilakukan di lingkungan kerja cenderung lebih dipengaruhi oleh kondisi internal seperti perilaku pekerja, kedisiplinan, serta pengawasan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, faktor eksternal seperti kondisi di luar perusahaan tidak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan K3.

Berdasarkan hasil wawancara yang dibuktikan dengan triangulasi, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal bukan merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi. Sehingga, upaya perbaikan dan peningkatan implementasi K3 sebaiknya lebih difokuskan pada faktor internal, khususnya pada peningkatan kesadaran dan perilaku pekerja agar tujuan keselamatan kerja dapat tercapai secara optimal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan melalui

kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh manajemen, disosialisasikan kepada seluruh pekerja, serta didukung oleh pengawasan dan penerapan prosedur keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD). Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja dan mendukung pencapaian zero accident.

Temuan ini sejalan dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa kebijakan K3 harus ditetapkan, dikomunikasikan, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan SMK3, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip SMK3 melalui komitmen manajemen, komunikasi yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja melalui kebijakan tertulis yang disahkan pimpinan, disosialisasikan kepada seluruh pekerja, serta diimplementasikan melalui berbagai program operasional K3. Komitmen tersebut diperkuat dengan pengawasan penggunaan APD, evaluasi berkala, dan pemasangan plakat komitmen K3 di area kerja sebagai pengingat visual bagi pekerja. Selain itu, pelaksanaan evaluasi secara berkala oleh unit induk menunjukkan bahwa kebijakan K3 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan (BPK RI, 2012).

Selain itu, implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi diwujudkan melalui berbagai program operasional yang mendukung pencapaian target zero accident, seperti pelaksanaan inspeksi K3 secara rutin untuk memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Penerapan kebijakan K3 juga mencakup mekanisme yang lebih komprehensif, antara lain penerapan working permit, identifikasi bahaya melalui Job Safety Analysis (JSA), peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

yang dilakukan secara berkelanjutan (Pangaribuan, Doda, & Kawatu, 2022).

Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan K3 telah diterapkan dalam suatu sistem kerja yang terstruktur dan terintegrasi. Keberadaan sistem manajemen yang terdokumentasi dengan baik menjadi alat kontrol untuk memastikan seluruh aktivitas K3 dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkala. Melalui adanya kebijakan yang jelas dan terdokumentasi, seluruh pekerja memiliki pedoman yang kuat dalam menjalankan aktivitas kerja secara aman dan sesuai prosedur, sekaligus mendorong terbentuknya budaya keselamatan kerja yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keselamatan diri sendiri maupun rekan kerja.

Berdasarkan konteks implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Perbandingan ini penting untuk melihat sejauh mana kesesuaian temuan penelitian dengan kondisi empiris di lokasi lain serta untuk memperkuat validitas hasil penelitian yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan pada PT. Permata Dunia Sukses Utama menunjukkan bahwa penerapan SMK3 yang mencakup komitmen dan kebijakan K3, perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta tinjauan ulang manajemen telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Penelitian tersebut menunjukkan tingkat penerapan SMK3 mencapai 162 kriteria dari total 166 kriteria atau sebesar 97,5%, yang termasuk dalam kategori memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SMK3 sangat dipengaruhi oleh kuatnya komitmen perusahaan dalam menetapkan kebijakan K3 secara menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan (BPK RI, 2012).

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi, terdapat kesamaan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek penetapan kebijakan K3 yang sama-sama bersifat formal, terdokumentasi, dan berasal dari komitmen manajemen puncak. Kedua penelitian menunjukkan bahwa kebijakan K3 tidak hanya ditetapkan sebagai formalitas, tetapi telah menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan yang

mendukung pencapaian Zero Accident. Namun demikian, terdapat perbedaan pada tingkat pengukuran capaian, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kriteria audit SMK3, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif yang menggambarkan proses implementasi kebijakan secara mendalam melalui pengalaman informan di lapangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Manderos di PLN UP3 Tobelo juga menunjukkan hasil yang sejalan, implementasi SMK3 telah memenuhi unsur K3 berdasarkan hasil audit SMK3 tahun 2023 dengan kategori memuaskan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kebijakan K3 merupakan bentuk nyata dari komitmen manajemen dan pekerja dalam menerapkan SMK3, yang didukung oleh tersedianya dokumen prosedur kerja, manual K3, perencanaan K3, serta program kerja yang bertujuan untuk meniadakan kecelakaan kerja. Selain itu, aspek pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi SMK3 di perusahaan (Purwanda, Tijang, & Machmud, 2025).

Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi menunjukkan keselarasan dalam penerapan kebijakan K3 yang sistematis dan terintegrasi dalam siklus SMK3 sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan K3 tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan pemenuhan dokumen, tetapi juga diperkuat melalui briefing keselamatan, inspeksi K3, penggunaan APD, serta pengawasan langsung di lapangan, sehingga lebih menekankan pembentukan budaya keselamatan dan perilaku kerja yang aman.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Leony Milenia Astari dan I Made Suidarma tentang implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SMK3 telah berjalan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 50 Tahun 2012 melalui penerapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja K3 yang terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi literatur yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur-

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

unsur SMK3 secara konseptual dan administratif.

Sementara itu, hasil penelitian di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan K3 tidak hanya diwujudkan melalui dokumen dan sistem manajemen, tetapi juga melalui praktik langsung di lapangan seperti safety briefing, inspeksi K3, penggunaan APD, penerapan working permit, serta pengawasan berkelanjutan yang bertujuan membangun budaya keselamatan kerja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan K3 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan dokumen formal, tetapi juga oleh konsistensi penerapan serta keterlibatan seluruh pekerja dalam menjalankan budaya keselamatan kerja sehari-hari.

Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada capaian kuantitatif berbasis audit SMK3, sedangkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai bagaimana kebijakan K3 diterjemahkan dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan K3 di tingkat unit operasional.

Sehingga, hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi penetapan kebijakan K3 di berbagai perusahaan, khususnya di lingkungan PLN, memiliki pola yang relatif serupa, yaitu berbasis komitmen manajemen, terdokumentasi secara formal, serta mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Perbedaan utama terletak pada pendekatan implementasi dan tingkat kedalaman penerapan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SMK3 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan budaya keselamatan kerja yang terbentuk di lingkungan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan mekanisme organisasi perusahaan. Perencanaan K3 disusun oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi kemudian diturunkan kepada unit pelaksana untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional. Pola

ini menunjukkan bahwa perencanaan K3 telah mengikuti pendekatan top-down yang bertujuan untuk memastikan keseragaman kebijakan dan program keselamatan kerja di seluruh unit perusahaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan K3 dirumuskan melalui forum rapat yang membahas berbagai program kerja, seperti pelatihan K3, pengadaan alat pelindung diri (APD), serta kegiatan lain yang mendukung keselamatan kerja. Program-program tersebut disusun sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya penerapan K3. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan K3 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan kerja sehari-hari.

Perencanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi juga didukung oleh keberadaan Tim Leader K4L yang mengintegrasikan fungsi keselamatan kerja, keamanan, dan lingkungan dalam satu struktur organisasi. Selain itu, perencanaan K3 merupakan turunan dari kebijakan Unit Induk Bisnis Pembangkit (UIBP) yang kemudian disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan melalui rapat bulanan dan rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Melalui forum tersebut dilakukan pembahasan program kerja, identifikasi kendala, serta penyusunan solusi untuk mendukung pelaksanaan K3 yang lebih efektif.

Meskipun perencanaan K3 disusun secara berjenjang dari tingkat manajemen, hasil penelitian menunjukkan adanya unsur partisipatif dalam proses perencanaannya. Pekerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait kebutuhan K3 yang mereka hadapi di lapangan. Keterlibatan pekerja ini menjadi penting karena mereka memiliki pengalaman langsung terhadap kondisi kerja dan potensi bahaya yang ada, sehingga informasi yang diberikan dapat membantu perusahaan dalam menyusun program K3 yang lebih relevan dan aplikatif.

Secara substansi, perencanaan K3 di unit ini telah mencakup berbagai komponen penting dalam SMK3, seperti penyusunan program kerja, pelatihan keselamatan, pengadaan APD, identifikasi kebutuhan operasional, penilaian risiko, dan penentuan prioritas pengendalian bahaya. Namun,

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

penelitian juga menemukan beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani K3 karena masih tergabung dalam fungsi K4L, serta ketergantungan terhadap kebijakan dari tingkat pusat yang dapat membatasi fleksibilitas unit dalam merespons perubahan kondisi dan risiko di lapangan secara cepat (Purwanda, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pada PT Permata Dunia Sukses Utama yang menunjukkan bahwa perencanaan K3 merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi SMK3. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Manderos pada PLN UIP3 Tobelo yang menyatakan bahwa perencanaan K3 menjadi bagian integral dari penerapan SMK3 melalui penyusunan program kerja, pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang baik menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas penerapan K3 di lingkungan kerja.

Namun, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astari dan Suidarma (2022) pada PT ANTAM Tbk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam implementasi SMK3 adalah perencanaan program K3 yang masih sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan manajemen tingkat atas sehingga ruang partisipasi pekerja dalam proses perencanaan relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan dan permasalahan K3 yang muncul di tingkat operasional tidak selalu dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan program kerja.

Sementara itu, hasil penelitian di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi menunjukkan bahwa meskipun perencanaan K3 disusun secara berjenjang berdasarkan kebijakan Unit Induk Bisnis Pembangkit (UIBP), pekerja tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait kebutuhan keselamatan kerja melalui rapat bulanan maupun forum P2K3. Dengan demikian, perencanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi pendekatan partisipatif sehingga program K3 yang disusun lebih sesuai dengan kondisi dan risiko kerja yang dihadapi di lapangan.

Secara teoritis, perencanaan K3 merupakan tahap awal yang sangat penting dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) karena berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan tujuan, sasaran, program kerja, serta langkah pengendalian risiko. Sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012, perencanaan K3 harus disusun berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko serta didukung oleh dokumentasi, komunikasi, dan sumber daya yang memadai (Rahman, Rahma, Susanto, Djuanda, & Agung, 2025). Sehinggadapat dipahami bahwa perencanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah memenuhi prinsip-prinsip SMK3 melalui proses yang sistematis, melibatkan berbagai pihak, dan didukung oleh mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan K3 adalah masih adanya pekerja yang belum disiplin menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap. Beberapa pekerja cenderung lebih patuh ketika terdapat pengawasan dari petugas K3 atau atasan, namun tingkat kepatuhan menurun ketika pengawasan tidak dilakukan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan serta belum terbentuknya kesadaran intrinsik yang kuat terhadap pentingnya keselamatan kerja.

Selain faktor pengawasan, kenyamanan penggunaan APD juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan K3. Sebagian pekerja menganggap penggunaan APD tertentu dapat mengurangi kenyamanan saat bekerja sehingga memengaruhi konsistensi penggunaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek ergonomi dan persepsi pekerja terhadap APD turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Sehingga, selain penegakan aturan, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor kenyamanan agar pekerja lebih mudah menerima dan menerapkan penggunaan APD secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah didukung oleh berbagai upaya pembinaan dan pengawasan, seperti safety briefing sebelum

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

pekerjaan dimulai, pengingat langsung dari petugas K3 maupun atasan, serta pengawasan rutin terhadap aktivitas kerja. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko kerja dan membentuk kebiasaan kerja yang aman. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya K3 masih perlu diperkuat karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penggunaan APD serta adanya pengaruh kebiasaan kerja lama yang belum sepenuhnya berubah.

Melalui konteks implementasi SMK3, pelaksanaan K3 di unit ini juga didukung oleh dokumentasi capaian keselamatan kerja berupa penghargaan Zero Accident. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa secara umum program K3 yang diterapkan telah memberikan hasil positif dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja. Selain sebagai bukti keberhasilan penerapan K3, penghargaan tersebut juga menjadi bentuk pengakuan eksternal atas komitmen perusahaan dalam mengelola keselamatan kerja secara konsisten dan berkelanjutan (Ramdani, Ramdani, & Vernando, 2023).

Keberadaan penghargaan Zero Accident memiliki nilai strategis dalam mendukung budaya keselamatan kerja karena dapat memberikan motivasi bagi pekerja untuk mempertahankan perilaku kerja yang aman serta mendorong manajemen untuk terus meningkatkan kinerja K3. Sehingga, penghargaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol keberhasilan, tetapi juga sebagai sarana penguatan budaya keselamatan kerja yang berorientasi pada pencegahan kecelakaan dan perlindungan pekerja (Ramdani et al., 2023).

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kedisiplinan pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) masih tergolong rendah sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Rendahnya kepatuhan penggunaan APD dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, motivasi, dan pelatihan yang belum optimal (Rini & Aswin, 2021).

Berbeda dengan temuan tersebut, pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah didukung oleh berbagai program keselamatan seperti safety briefing, pengawasan rutin, pelatihan

K3, penerapan working permit, serta monitoring penggunaan APD secara berkelanjutan. Meskipun masih ditemukan beberapa pekerja yang belum disiplin menggunakan APD secara lengkap, secara umum pelaksanaan K3 telah berjalan dengan baik dan dibuktikan dengan pencapaian penghargaan Zero Accident. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan K3 tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan prosedur dan fasilitas keselamatan, tetapi juga oleh efektivitas pembinaan, pengawasan, dan budaya keselamatan kerja yang berkembang dalam organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah didukung oleh sistem, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi terletak pada aspek perilaku pekerja dan konsistensi kepatuhan terhadap aturan keselamatan (Saari, Hariani, & Muhammad, 2024). Sehingga, perusahaan perlu terus meningkatkan pembinaan, edukasi, dan pengawasan agar pelaksanaan K3 tidak hanya bergantung pada kontrol eksternal, tetapi menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari seluruh pekerja.

Secara teoritis, pelaksanaan K3 merupakan tahap implementasi dari perencanaan dalam SMK3 yang bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan, prosedur, dan program keselamatan diterapkan secara efektif. Sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012, keberhasilan pelaksanaan K3 tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan SOP dan fasilitas keselamatan, tetapi juga oleh kompetensi, komunikasi, pengawasan, serta budaya keselamatan kerja yang kuat (Sagara, 2021). Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek budaya keselamatan dan kesadaran individu agar penerapan K3 dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan dan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah menjadi bagian penting dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan terstruktur melalui pengawasan langsung di area kerja untuk memastikan seluruh aktivitas operasional

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan terhadap perilaku pekerja, kondisi lingkungan kerja, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan sehingga potensi bahaya dan risiko kecelakaan dapat diidentifikasi sejak dini.

Hasil pemantauan kemudian dievaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan maupun kendala dalam penerapan K3. Evaluasi tersebut mencakup aspek teknis, perilaku pekerja, serta efektivitas sistem pengawasan yang telah berjalan. Melalui proses evaluasi yang berkelanjutan, perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Sehingga, pemantauan dan evaluasi membentuk suatu siklus yang saling berkaitan dalam upaya peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan.

Selain pengawasan rutin, perusahaan juga melaksanakan audit internal sebagai bagian dari sistem evaluasi yang lebih komprehensif. Audit dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian penerapan K3 dengan standar yang berlaku, baik dari aspek implementasi maupun kelengkapan dokumentasi. Audit internal juga menjadi sarana persiapan sebelum dilaksanakan audit eksternal sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh bukti pelaksanaan K3 terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Mekanisme evaluasi semakin diperkuat melalui sistem pelaporan berjenjang yang dilakukan secara rutin kepada manajemen. Laporan tersebut memuat hasil pengawasan, temuan di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Sistem pelaporan ini memungkinkan manajemen memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi aktual di lapangan sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat dalam mendukung peningkatan kinerja keselamatan kerja.

Meskipun sistem pemantauan dan evaluasi telah berjalan dengan baik, penelitian menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Beberapa temuan belum seluruhnya ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan masalah yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemantauan dan

evaluasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi masalah, tetapi juga oleh konsistensi perusahaan dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap setiap temuan yang diperoleh.

Secara teoritis, pemantauan dan evaluasi K3 merupakan fungsi pengendalian (controlling) dalam siklus manajemen yang bertujuan memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 dan konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang menempatkan pemantauan, evaluasi, audit, dan tindak lanjut sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) (Salcha, Juliani, & Pangande, 2022). Sehingga dapat dipahami bahwa sistem pemantauan dan evaluasi K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah memenuhi prinsip-prinsip SMK3, namun masih memerlukan penguatan pada aspek tindak lanjut hasil evaluasi agar tujuan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manderos (2024) pada PLN UIP3 Tobelo yang menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi K3 dilaksanakan secara berkala melalui inspeksi, audit internal, pelaporan kinerja K3, serta evaluasi terhadap temuan yang diperoleh di lapangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam implementasi SMK3 karena berfungsi untuk memastikan seluruh program K3 berjalan sesuai standar dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi, di mana pemantauan dilakukan melalui pengawasan rutin, audit internal, dan sistem pelaporan berjenjang yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan tindakan perbaikan terhadap berbagai permasalahan K3 yang ditemukan (Simbolon, Harramain, & Sonjaya, 2024).

Namun, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Veranita, dan Amir pada proyek konstruksi peningkatan jalan di Kecamatan Darul Makmur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi K3 belum berjalan optimal karena pengawasan terhadap pekerja masih

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

terbatas, pelaksanaan inspeksi belum dilakukan secara konsisten, serta tindak lanjut terhadap temuan keselamatan belum dilaksanakan secara maksimal. Akibatnya, masih ditemukan berbagai pelanggaran penggunaan APD dan ketidaksesuaian terhadap prosedur keselamatan kerja.

Berbeda dengan temuan tersebut, Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur melalui pengawasan rutin, audit internal, serta pelaporan berkala kepada manajemen. Meskipun masih terdapat tantangan dalam percepatan tindak lanjut beberapa hasil evaluasi, secara umum mekanisme pengendalian K3 telah berjalan dengan baik dan mendukung upaya peningkatan kinerja keselamatan kerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya peninjauan dan peningkatan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi telah menerapkan prinsip continuous improvement sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Proses ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil monitoring, inspeksi, dan audit internal sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelemahan, potensi risiko, serta peluang perbaikan. Setiap temuan yang diperoleh dianalisis dan ditindaklanjuti melalui tindakan korektif maupun preventif guna mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Selain berfokus pada aspek teknis, peninjauan dan peningkatan K3 juga diarahkan pada pembentukan perilaku dan budaya keselamatan kerja. Perusahaan berupaya meningkatkan kesadaran pekerja melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan pemberian penghargaan atau insentif kepada pekerja yang menunjukkan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam penerapan K3. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keterlibatan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berbudaya keselamatan.

Proses peninjauan dan peningkatan yang diterapkan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta kondisi operasional di lapangan. Setiap hasil evaluasi dan pengalaman kerja dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan maupun prosedur kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

sistem K3 dipandang sebagai sistem yang terus berkembang dan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk menjaga efektivitas pengendalian risiko kerja.

Jika dikaitkan dengan PP Nomor 50 Tahun 2012, upaya peninjauan dan peningkatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip management review dalam SMK3 yang bertujuan memastikan efektivitas sistem secara berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal dan komitmen seluruh pihak agar setiap rekomendasi perbaikan dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga peningkatan kinerja K3 dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan (Hanum, Yusman, & Rahmadiani, 2021).

Hasil penelitian Willia Novita Eka Rini dan Budi Aswin mengenai analisis dan prediksi tren kecelakaan kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dan diprediksi terus meningkat hingga tahun 2024. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kondisi ini berkaitan dengan hasil penelitian di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi yang menunjukkan bahwa peninjauan dan peningkatan K3 menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penerapan SMK3 di lingkungan kerja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ismail, Veranita dan Amir yang menunjukkan bahwa peninjauan dan peningkatan K3 belum berjalan optimal karena tindak lanjut terhadap hasil evaluasi masih terbatas sehingga beberapa permasalahan keselamatan kerja cenderung berulang. Sebaliknya, Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi ada peninjauan dan peningkatan K3 yang telah dilakukan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil monitoring, inspeksi, dan audit internal sebagai dasar tindakan korektif dan preventif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan K3 sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dalam

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten (Sunaryani, Ayu, Rhomadhoni, & Sahri, 2025).

Secara teoritis, peninjauan dan peningkatan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian dari prinsip continuous improvement yang menjadi inti dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3). Konsep ini menekankan bahwa sistem keselamatan kerja harus selalu mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan melalui siklus manajemen yang sistematis. Berdasarkan kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, peninjauan dan peningkatan dilakukan melalui tahapan tinjauan ulang manajemen berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan audit yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setiap temuan yang diperoleh menjadi dasar dalam menetapkan tindakan korektif (corrective action) untuk memperbaiki ketidaksesuaian, serta tindakan preventif (preventive action) untuk mencegah potensi bahaya di masa yang akan datang (Tarigan, 2021).

Melalui perspektif manajemen modern, peninjauan dan peningkatan K3 juga berkaitan erat dengan pembentukan budaya keselamatan kerja (safety culture) yang kuat di dalam organisasi. Upaya peningkatan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis dan sistem, tetapi juga pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran pekerja. Pendekatan seperti pemberian penghargaan, pembinaan, serta keterlibatan aktif pekerja dalam program K3 merupakan strategi yang efektif untuk mendorong internalisasi nilai-nilai keselamatan. Melalui adanya budaya K3 yang baik, setiap individu akan memiliki tanggung jawab pribadi terhadap keselamatan kerja, sehingga peningkatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam praktik kerja sehari-hari (Triwati & Nuhardin, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi. Meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen K3 yang terstruktur, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada perilaku pekerja sebagai pelaksana utama di lapangan. Tingkat kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja menjadi faktor yang sangat

menentukan, karena pekerja yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan dan prosedur keselamatan dibandingkan pekerja yang menganggap K3 hanya sebagai kewajiban formal.

Perbedaan karakteristik individu, seperti latar belakang, pengalaman kerja, tingkat pengetahuan, dan kebiasaan kerja, juga memengaruhi penerapan K3 di lingkungan kerja. Sebagian pekerja dapat dengan mudah beradaptasi terhadap prosedur keselamatan yang berlaku, sementara sebagian lainnya memerlukan pendekatan yang lebih intensif melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan. Selain itu, kebiasaan kerja yang telah terbentuk sebelumnya sering kali menjadi hambatan dalam penerapan prosedur baru, sehingga perubahan perilaku membutuhkan proses yang bertahap dan berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan konsep SMK3 dan PP Nomor 50 Tahun 2012, faktor internal merupakan bagian penting dari keterlibatan pekerja (worker involvement) dan pembentukan budaya keselamatan (safety culture). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan K3 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem dan kebijakan perusahaan, tetapi juga oleh kesadaran, disiplin, serta komitmen pekerja dalam menjalankan prosedur keselamatan secara konsisten (Nabila & Susilawati, 2024). Sehingga, penguatan budaya K3 melalui edukasi, pembinaan, dan peningkatan partisipasi pekerja perlu terus dilakukan agar implementasi SMK3 dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain kesadaran, kedisiplinan pekerja juga menjadi faktor internal yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan K3. Disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri (APD), mematuhi prosedur kerja, serta mengikuti instruksi keselamatan masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa budaya keselamatan kerja belum sepenuhnya tertanam secara merata pada seluruh pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar perilaku kerja aman dapat menjadi kebiasaan dalam setiap aktivitas operasional (Wahyudi, Hidayat, Valentino, & Dwi, 2025).

Berdasarkan teori perilaku organisasi, faktor internal sangat erat kaitannya dengan konsep

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

human behavior dalam keselamatan kerja yang menjelaskan bahwa tindakan tidak aman (unsafe action) sering kali dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran risiko, kebiasaan kerja yang tidak sesuai prosedur, serta kurangnya disiplin individu. Kesadaran keselamatan (safety awareness) menjadi elemen kunci yang menentukan apakah pekerja akan mematuhi atau mengabaikan aturan K3 (Wahyudi, Mardiyah, & Nugraha, 2024). Oleh karena itu, pembentukan perilaku kerja yang aman tidak hanya dapat dicapai melalui aturan formal, tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan, pembiasaan, serta penguatan budaya keselamatan (safety culture) yang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan kerja. Sehingga, faktor internal menjadi penentu utama dalam menciptakan konsistensi penerapan K3 di tingkat operasional (Yulistia, Sari, & Risa, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal dalam penerapan K3 di Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi memiliki pengaruh yang relatif kecil dibandingkan dengan faktor internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi SMK3 lebih banyak ditentukan oleh aspek yang berasal dari dalam organisasi, seperti perilaku pekerja, tingkat kedisiplinan, kesadaran terhadap keselamatan kerja, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh manajemen.

Secara umum, faktor eksternal mencakup regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, kondisi sosial ekonomi, standar industri, serta pengaruh pihak ketiga seperti kontraktor dan pemasok. Namun, pada Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi, faktor-faktor tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan K3 sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sistem manajemen K3 yang diterapkan telah mengacu pada standar dan regulasi yang berlaku, sehingga berbagai ketentuan eksternal telah terintegrasi ke dalam kebijakan dan prosedur internal perusahaan.

Karakteristik kegiatan operasional pembangkit listrik yang bersifat teknis, terstruktur, dan memiliki prosedur kerja yang jelas juga menyebabkan pengaruh faktor eksternal menjadi lebih terbatas. Pengendalian risiko lebih banyak dilakukan melalui mekanisme internal perusahaan, sehingga ruang intervensi dari faktor luar relatif kecil. Selain itu,

pengawasan dari instansi terkait dan penerapan regulasi pemerintah lebih berfungsi sebagai bentuk kontrol kepatuhan dan acuan normatif yang mendukung pelaksanaan K3, bukan sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi perilaku kerja di lapangan (Winarsunu, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi K3 lebih banyak bersumber dari faktor internal organisasi dibandingkan faktor eksternal. Keberhasilan penerapan SMK3 sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia, membangun budaya keselamatan kerja, serta menjaga konsistensi pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, faktor eksternal lebih berperan sebagai kerangka regulasi dan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan K3.

Secara teoritis, faktor eksternal dalam SMK3 berfungsi sebagai acuan normatif yang mengarahkan organisasi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan standar keselamatan kerja yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012.45 Namun, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada kemampuan organisasi dalam menginternalisasikan berbagai tuntutan eksternal tersebut ke dalam kebijakan dan praktik operasional. Dalam konteks Unit Pembangkit PLN Payo Selincih Jambi, sistem K3 yang telah berjalan dengan baik membuat pengaruh faktor eksternal tidak terlalu dominan, sehingga implementasi K3 lebih dipengaruhi oleh kondisi dan pengelolaan internal perusahaan (Yani, 2025).

Efektivitas penerapan K3 lebih banyak ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengadaptasi regulasi eksternal ke dalam praktik kerja internal, dibandingkan oleh tekanan eksternal itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berfungsi sebagai kerangka pengendali umum, sementara implementasi nyata tetap bergantung pada kekuatan sistem internal perusahaan (Yulistia et al., 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3K) di PLN Payo Selincih Unit Jambi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kebijakan K3K telah diimplementasikan secara formal, struktural, dan top-down dari manajemen pusat. Kebijakan K3K telah

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

didokumentasikan, disosialisasikan kepada seluruh pekerja, dan didukung oleh komitmen manajemen untuk mencapai target Nol Kecelakaan. Secara umum, pembentukan kebijakan K3K sesuai dengan persyaratan K3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tantangan dalam menerapkan kebijakan K3 di Unit PLN Payo Seilincih Jambi didominasi oleh faktor internal, khususnya kesadaran, disiplin, dan perilaku karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja. Sementara itu, faktor eksternal tidak memiliki dampak signifikan karena sebagian besar telah diakomodasi dalam kebijakan dan sistem perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiratna Y, Astono S, Fertiaz M, Subhan, S. Sugistria, C., & Prayitno, H. (2022). *The Indonesian National Occupational Safety and Health Profile in 2022*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Agustiani, D., & Arsi, A. A. (2025). Persepsi Makna terhadap Pembentukan Perilaku Pekerja dalam Menghadapi Risiko Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal: Perilaku Pekerja di Galangan Kapal. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1268-1277.
- Astari, M. L. M., & Suidarma, I. M. (2022). Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 7(1), 24-33.
- Ariya, R. (2024). *Analisis Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Budaya Keselamatan Kerja Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Aceh).
- BPK RI. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5263/pp-no-50-tahun-2012>
- Cahyani, S. T., & Ars, M. (2025). Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Teori, Strategi dan Inovasi di Era Modern*, 51.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Daeli, B., Rahman, D. F., Fatimah, Z. N., & Rahmat, H. K. (2025). Kecelakaan Kerja dan Urgensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Dunia Industri: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Widya Bhakti: Jurnal Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 29-40.
- Daniel, A., S., R. (2022). *Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju
- Darmadi, D. (2020). *Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan*. Tangerang: JIMF
- Diaz, A. S., Rambey, H., & Tarigan, L. (2024). Evaluation of the implementation of SMK3 at the Grandmed Lubuk Pakam Hospital in 2024. *Jurnal Kesmas dan Gizi (JKG)*, 7(1), 58-65.
- Hanum, N. Z., Yusman, R., & Rahmadiani, Y. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Kota Padang. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Ksdam I/BB Medan*, 6(1), 69-73.
- Nabila, Y. A., & Susilawati, S. (2024). Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja. *USADA NUSANTARA: Jurnal Kesehatan Tradisional*, 2(2), 1-11.
- Pangaribuan, M., Doda, D. V. D., & Kawatu, P., A., T. (2022). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Teori dan Praktik Penetapan Kebijakan K3*. Manado: Unsrat Press; 2022.
- Priono, N., J. (2025). *Acuan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012*. Yogyakarta: Deepublish; 2025.

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universtias Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>

Gambaran implementasi SMK3 dan tantangan penerapan kebijakan di unit pembangkit PLN: Studi kualitatif

- Purwanda, N. W., Tijjang, B., & Machmud, M. (2025). Pengaruh Strategi Perencanaan dan Pengendalian K3 Terhadap Pencapaian Kinerja Keselamatan. *Center of Economic Students Journal*, 8(4), 1239-1249.
- Rahman, A. M., Rahma, M. A., Susanto, P. Z., Djuanda, D., & Agung, M. (2025). Analisis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Departemen Fasilitas dan Sarana PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar. *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika*, 4(1), 107-116.
- Ramdani, M. I., Ramdani, S. D., & Vernando, V. (2023). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Berdasarkan ISO 45001: 2018 di Bengkel Mitsubishi Dipo Internasional Pahala Otomotif Serang City. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3), 199-206.
- Rini, W. N. E., & Aswin, B. (2021). Analisis Dan Prediksi Tren Kecelakaan Kerja Karyawan Serta Pengambilan Kebijakan Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Jamb. *Jambi Medical Journal: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 9(1), 62-68.
- Saari, D. P., Hariani, Y., & Muhammad, N. (2024). Dampak pengetahuan, sikap dan masa kerja dengan kejadian kecelakaan kerja di PT X Palembang tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Terapan*, 11(2), 148-155.
- Sagara, Y. (2021). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Vol. 17. Depok: Rajawali Pers.
- Salcha, M. A., Juliani, A., & Pangande, J. M. H. (2022). Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada pekerja di Sorowako Sulawesi Selatan. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1838-1845.
- Simbolon, R. R., Harramain, F. P., & Sonjaya, M. R. P. (2024). Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai faktor penentu optimalisasi produktivitas kerja. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 17-31.
- Sunaryani, P. R., Ayu, F., Rhomadhoni, M. N., & Sahri, M. (2025). Penyusunan Prosedur Ibpr Pt. Pln (Persero) Uit Jbm Sesuai Dengan Peraturan Direksi Pt. Pln (Persero) Tentang Pedoman Umum Matriks Terintegrasi Tahun 2021. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1506-1517.
- Tarigan, S. (2021). Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada industri pengolahan minyak kelapa sawit. *Jurnal Prima Medika Sains*, 3(1), 1-5.
- Triwati, I., & Nuhardin, I. (2023). Penerapan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perguruan Tinggi Vokasi. *Abdimas Singkerru*, 3(2), 48-52.
- Wahyudi, I. A., Hidayat, N. F., Valentino, M. R., & Dwi, M. R. (2025). Penerapan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Karyawan. *EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 65-70.
- Wahyudi, R., Mardiyah, R. A. A. I., & Nugraha, A. T. (2024). Identifikasi ISO 45001: 2018 Dengan Pendekatan Gap Analysis dan PDCA Di RS Raamx. *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri*, 14(2), 215-224.
- Winarsunu, T. (2024). *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press; 2024.
- Yani, A. (2025). Efektivitas Pelatihan Keselamatan Kerja di Konstruksi Dan Peran Manajemen dalam Meningkatkan Kepatuhan K3; Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 3(1), 08-17.
- Yulistia, E., Sari, E. K., & Risa, O. (2023). Penerapan Budaya K3 Terhadap Kinerja Karyawan Pada Department of Mining PT Semen Baturaja. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 9(1), 37-44.

Sarah Enjelina Siahaan*, Ashar Nuzulul Putra, Muldiasman, Budi Aswin

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Sarah Enjelina Siahaan. *Email: sarahenjelinasiahaan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i6.3225>